



## INTISARI

Penelitian ini membahas proses akulturasi keruangan yang terjadi di Kawasan Transmigrasi Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kawasan ini merupakan titik pertemuan antara masyarakat transmigrasi yang berasal dari Jawa dan masyarakat asli Papua yang hidup berdampingan sejak program transmigrasi tahun 1979. Pertemuan kedua kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda menciptakan dinamika sosial, budaya, dan spasial yang menarik untuk dikaji dalam konteks akulturasi keruangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan proses akulturasi keruangan di Kawasan Transmigrasi, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode *grounded theory*. Data yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam pada lima unit amatan, yaitu ruang ekonomi pasar, ruang terbuka alun-alun, ruang pendidikan, ruang kesehatan, dan ruang perumahan. Analisis data dilakukan melalui tahapan *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* untuk mengidentifikasi kategori utama dan membangun *substantive theory* mengenai proses akulturasi keruangan Kawasan Transmigrasi, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses akulturasi keruangan terbentuk melalui siklus berulang yang terdiri atas interaksi, adaptasi, dan akulturasi. Pasar menjadi ruang yang mewadahi strategi keberlanjutan berdagang yang menggabungkan efisiensi modern dan fleksibilitas tradisional, alun-alun menjadi ruang yang mengintegrasikan antara tradisi dan modernitas, ruang pendidikan sebagai wadah lintas budaya, ruang kesehatan sebagai medium bagi akomodasi, pemahaman, dan integrasi budaya, ruang perumahan sebagai katalis dan arena akulturasi bagi masyarakat. Akulturasi yang terbentuk bersifat koeksistensi fungsional dan menghasilkan ruang sosial baru yang harmonis, menunjukkan bahwa ruang berperan aktif sebagai medium integrasi budaya yang dapat menjadi dasar bagi kebijakan perencanaan ruang berperspektif multikultural.



## ABSTRACT

This study discusses the process of spatial acculturation occurring in the Transmigration Area of Aimas District, Sorong Regency, West Papua Province. The area serves as a meeting point between transmigrant communities from Java and indigenous Papuan communities who have lived side by side since the implementation of the transmigration program in 1979. The encounter between these two culturally distinct groups has created complex social, cultural, and spatial dynamics that are intriguing to examine within the context of spatial acculturation. This study aims to identify and understand the process of spatial acculturation in the Transmigration Area of Aimas District, Sorong Regency.

The research employs a qualitative approach using the grounded theory method. Data were collected through field observations and in-depth interviews across five units of analysis: the market as an economic space, the town square as an open space, educational facilities, health facilities, and residential areas. Data analysis was conducted through the stages of open coding, axial coding, and selective coding to identify key categories and develop a substantive theory of the spatial acculturation process in the Aimas Transmigration Area.

The results show that spatial acculturation is formed through a recurring cycle consisting of interaction, adaptation, and acculturation. The market has evolved into a space that accommodates sustainable trading strategies by combining modern efficiency and traditional flexibility; the town square integrates tradition and modernity; educational facilities serve as a cross-cultural platform; health facilities function as a medium for cultural accommodation, understanding, and integration; and residential areas act as catalysts and arenas for social acculturation. The acculturation that emerges represents a form of functional coexistence, resulting in new, harmonious social spaces. This indicates that space plays an active role as a medium of cultural integration and can serve as a foundation for multicultural-oriented spatial planning policies.